

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 561/Ekonomi Pembangunan

Bidang Fokus : Bidang X

#### USULAN PENELITIAN DOSEN



#### **ANALISIS PENGARUH SEKTOR BASIS DAN NON BASIS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 - 2021**

#### **TIM PENGUSUL**

Ketua	: Yunie Rahayu, SE, ME	NIDN : 1021067804
Anggota	: Ahmad Soleh, SE, ME	NIDN : 1015058502
	Dr. Sesarria Yuvanda, Sp, ME	NIDN : 1001077601

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI**

**2022**

**ANALISIS PENGARUH SEKTOR BASIS DAN NON BASIS TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2010 - 2021**

**BAB I. LATAR BELAKANG**

Dewasa ini, era globalisasi mendorong aktivitas ekonomi maju berkembang tanpa batas. Transaksi ekonomi yang terjadi tidak terjadi hanya dalam skala daerah, nasional bahkan sampai internasional. Menyikapi semua itu, konteks pertumbuhan ekonomi tidak bisa dikesampingkan dari semua itu dan tentunya pembangunan ekonomi sangat juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dimana keduanya mempunyai kaitan yang erat. Pertumbuhan ekonomi sendiri proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional maupun riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil yang konstan dan meningkat dari tahun ke tahun. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah terjadi apabila ada kenaikan output pendapatan perkapita dan menggambarkan kenaikan taraf hidup masyarakat diukur dengan output riil per orang maupun masyarakat.

Menurut (Soekirno, 2003) “Pertumbuhan ekonomi (economic growth) bergantung dari pembangunan ekonomi dimana pembangunan ekonomi mendorong dalam tumbuhnya ekonomi dan sebaliknya pula, Sedangkan maksud dari pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional”. Negara dapat disebut mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi jika terjadi

peningkatan GNP riil di negara tersebut. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikasi terhadap keberhasilan dari pembangunan ekonomi. Sangat mengingat konsep pertumbuhan ekonomi sebagai tolok ukur penilaian pertumbuhan ekonomi nasional sudah terlanjur diyakini serta diterapkan secara luas, dan sudah masuk kedalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, maka kita tidak boleh ketinggalan dan mau tidak mau juga harus berusaha mempelajari hakekat dan sektor-sektor pertumbuhan ekonomi tersebut. Disini Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki arti dan definisi yang sangat berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah maupun nasional. Sedangkan Pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan per kapita di masyarakat dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen menjadi sektor-sektor penopang. Adapun salah satu faktor juga dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah dengan melihat pertumbuhan ekonominya. Dalam menyusun pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi target utama. Menurut Restiatun (2009), “Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperlukan guna mempercepat struktur perekonomian yang berimbang dan dinamis bercirikan industri yang kuat dan maju, serta memiliki basis pertumbuhan sektoral yang seimbang”. Dengan demikian

pertumbuhan ekonomi menjadi gambaran kinerja dalam melakukan pembangunan.

Sejalan dengan Restiatun, Menurut BPS (2010) “Produk Domestik Reginal Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sangat diperlukan untuk mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB adalah jumlah seluruh nilai tambah yang diciptakan oleh berbagai sektor lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu wilayah tanpa memperhatikan kepemilikan atas faktor produksi. PDRB dapat dikategorikan dalam berberbagai sektor ekonomi yaitu: Pertanian; Pertambangan dan penggalian; Industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran; angkutan dan komunikasi; persewaan dan jasa perusahaan; jasa lainnya”. Menurut data PDRB yang diperoleh dari BPS Provinsi Jambi, laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi pada tahun 2010-2020 fluktuatif dimana yang tertinggi terjadi di tahun 2011 yaitu sebesar 7,86% dan yang terendah terjadi di tahun 2020 yaitu -0,46% karena adanya pandemic covid 19. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya.

Walaupun pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2010-2021 namun dalam nilai riil PDRB Provinsi Jambi nilainya terus meningkat hal ini bisa terjadi dikarenakan sektor-sektor lain yang pertumbuhannya meningkat dan saling menutupi antar satu sama lain.

Tabel 1. PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha  
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Jambi Tahun 2021

Sektor	Rp (milyar)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	41.234,85
B. Pertambangan dan Penggalian	35.692,22
C. Industri Pengolahan	15.711,11
D. Pengadaan Listrik dan Gas	86,89
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	213,08
F. Konstruksi	12.033,11
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.044,58
H. Transportasi dan Pergudangan	4.412,59
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.661,08
J. Informasi dan Komunikasi	6.335,00
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.674,27
L. Real Estate	2.281,92
M.N. Jasa Perusahaan	1.540,30
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.093,76
P. Jasa Pendidikan	5.183,53
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.180,07
R.S.T.U. Jasa lainnya	1.503,33
Total PDRB	153.881,69

*Sumber : BPS Provinsi Jambi .*

Pada tahun 2021, sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB yaitu sebesar 31,56%. Sektor pertanian yang terus menerus memberikan kontribusi terbesar dikarenakan meningkatnya perhatian di sektor pertanian menunjang peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Jambi sebagai upaya meningkatkan pembangunan daerah mengingat sektor pertanian menjadi sector unggulan di Provinsi Jambi. selain itu

meningkatkan regulasi mengenai pengendalian alih fungsi lahan mengingat alih fungsi lahan menjadi faktor yang krusial yang mempengaruhi perubahan nilai kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Provinsi Jambi. Selanjutnya kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB adalah sektor pertambangan dan penggalan sebesar 14,09%. Setidaknya ada beberapa alasan yang menjadikan sektor ini penting yaitu dimana Indonesia merupakan negara yang berkembang sehingga penguasaan terhadap Iptek mutakhir masih cenderung tertinggal serta adanya keterbatasan dalam segi modal dan masih belum memiliki keunggulan komparatif pada sektor ekonomi yang berbasis IPTEK dan padat modal sehingga titik berat perekonomian lebih pada sektor ekonomi yang berbasis sumberdaya alam dan padat tenaga kerja. Sehingga sektor perekonomian di Provinsi Jambi yang memenuhi syarat tersebut adalah sektor pertambangan dan penggalan. Dari segi sektoral nilai PDRB tertinggi tahun 2021 di sektor-sektor yang berbasis sumberdaya alam di Provinsi Jambi seperti pertanian, perikanan maupun kehutanan serta sektor pertambangan dan penggalan.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi mengalami fluktuatif dari tahun 2010-2021 hal ini dipicu dari faktor-faktor kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB yang menjadi penopang seperti sektor` pertanian kehutanan dan perikanan maupun sector administrasi pemerintahan yang terus meningkat dan sektor-sektor ekonomi lain yang menjadi penopang juga memberikan nilai tambah pertumbuhan ekonomi. Tentunya akan semakin memperkuat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi kedepannya.

Menurut Richardson (Tarigan, 2005) “suatu daerah atau wilayah harus mampu membuat sektor-sektor saling terkait dan saling mendukung dengan cara mensinergikan sektor-sektor ekonomi. Sehingga pertumbuhan suatu sektor dapat mendorong pertumbuhan sektor lain. Sektor yang dimaksud disini adalah sektor basis dan non basis, Teori basis ekonomi mengungkapkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non basis. Kegiatan basis adalah semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah. Lapangan kerja dan pendapatan di sektor basis adalah fungsi permintaan yang bersifat eksogen (tidak tergantung pada kekuatan internal/permintaan lokal. Sedangkan kegiatan nonbasis adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, oleh karena itu permintaan sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kenaikan pendapatan masyarakat setempat”. Menurut Rustiadi, dkk (2011) “Kemampuan memacu pertumbuhan suatu wilayah atau negara sangat tergantung dari keunggulan atau daya saing sektor-sektor ekonomi di wilayahnya, Nilai strategis setiap sector didalam memacu menjadi pendorong utama (prime mover) pertumbuhan ekonomi wilayah berbeda-beda meliputi sektor-sektor yang ada antara lain, sektor potensial adalah sektor yang mempunyai potensi untuk dapat menjadi sektor basis di suatu wilayah, lebih lanjut Rustiadi dkk menjelaskan, sektor ekonomi suatu wilayah dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu sektor basis dimana kelebihan dan kekurangan yang terjadi dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut menyebabkan terjadinya mekanisme ekspor dan impor antar

wilayah, artinya sektor basis ini yang akan menghasilkan barang dan jasa, baik untuk pasar domestik daerah maupun pasar luar daerah/wilayah dan sektor non-basis adalah sektor dengan kegiatan ekonomi yang hanya melayani pasar di daerahnya sendiri, dan kapasitas ekspor daerah belum berkembang.” Provinsi Jambi sendiri memiliki sektor-sektor ekonomi penopang daerah, baik di sektor basis maupun sektor non basis yang antar sektor satu dengan sektor yang lain memiliki potensi untuk menjadi sektor utama daerah serta tentunya pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif menjadi pertimbangan sektor-sektor tersebut memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Melihat kondisi tersebut, perlu diadakan penelitian untuk mengetahui apakah pengaruh sektor basis dan pengaruh sektor non basis, dan pengaruh kedua sector tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Dengan demikian peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Sektor Basis dan Non Basis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi Tahun 2010-2021”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan masalah diatas maka akan timbul pertanyaan penelitian yaitu apakah ada pengaruh sektor basis dan sektor non basis terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tahun 2010-2021?



## **BAB II. LANDASAN TEORI**

### **Teori Lokasi**

Permasalahan pemilihan lokasi dalam setiap kegiatan pembangunan baik regional maupun nasional merupakan hal yang sangat penting dan perlu dipertimbangkan secara matang agar kegiatan tersebut dapat berlangsung secara produktif dan cukup efisien. Karenanya telah cukup banyak ahli ekonomi yang membahas tentang teori lokasi. Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (spatial order) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang langka, serta hubungannya atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha/kegiatan lain baik ekonomi maupun social (Tarigan, 2004:122).

Diantara sekian banyak teori lokasi yang diperkenalkan para ahli, diantaranya ada beberapa teori yang paling populer antara lain teori Von Thunen (1826) dan A.Weber (1909). Menurut Thunen (1826), jenis pemanfaatan lahan dipengaruhi oleh tingkat sewa lahan dan didasarkan pula pada aksesibilitas relatif. Lokasi berbagai produksi pertanian ditentukan oleh kaitan antara harga pasar dan jarak antara daerah produksi dan pasar penjualan. Sedangkan Weber (1909) lebih menekankan pentingnya biaya transportasi sebagai faktor pertimbangan lokasi (Adisasmita, 2005:42). Setelah Thunen dan Weber, muncul pula beberapa ahli ekonomi yang turut mengembangkan teori lokasi seperti W.Christaller (1933), A.Losch (1944) F.Perroux (1955) W.Isard (1956) dan J. Friedmann (1964) yang pada umumnya mengkaitkan teori lokasi mereka dengan sumber bahan mentah dan lokasi pasarnya. Dengan kriteria penentuan yang bermacam macam, antara

lain biaya transportasi yang terendah, sumber tenaga kerja yang relative murah, ketersediaan sumberdaya air, energy atau pun daya tarik lainnya berupa penghematan lokasional dan keuntungan aglomerasi (Adisasmita.2005:45). Menurut Tarigan (2004:150) tidak ada suatu teori tunggal yang bias menetapkan dimana lokasi suatu kegiatan produksi itu sebaiknya dipilih.

Dalam Era globalisasi, pemilihan lokasi berarti pertama-tama memilih dinegara mana lokasi usaha tersebut lebih menguntungkan. Selanjutnya memilih provinsi dan kabupaten/kota, tempat usaha tersebut akan dijalankan. Selain kriteria-kriteria umum diatas, faktor stabilitas politik merupakan pertimbangan penting bagi investor. Mereka lebih memilih kelangsungan usaha dalam jangka panjang daripada laba besar tapi tidak ada kepastian berusaha dalam jangka panjang.

### **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto atau sering disingkat dengan PDRB sering digunakan sebagai indikator yang mewakili besarnya suatu daerah dari sisi pendapatan regional suatu wilayah. Indikator PDRB ini sering muncul dalam pembicaraan keberhasilan pembangunan suatu daerah, dimana semakin tinggi nilai PDRB suatu wilayah menunjukkan semakin meningkat keberhasilan pembangunan suatu daerah, dan sebaliknya. Dalam buku statistik PDRB selalu dijelaskan definisi PDRB yaitu sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Nilai tambah yang dihasilkan atau seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan terdiri dari perkalian dua faktor yaitu : (i) volume tambah yang dihasilkan atau seluruh volume barang dan jasa akhir yang dihasilkan, dan (ii) harga barang dan jasa yang dinilai. Nilai tambah yang dihasilkan atau seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan itu diperoleh dari kegiatan produksi atau dalam definisi itu disebut sebagai “unit ekonomi”. Karena PDRB ini merupakan pendapatan agregat (menyeluruh) dari suatu wilayah tertentu, maka unit ekonomi yang menghasilkan nilai tambah atau barang dan akhir itu adalah “seluruh unit-unit ekonomi” yang ada di suatu wilayah tertentu itu. Jadi bukan nilai tambah atau nilai barang dan jasa akhir satu atau dua unit ekonomi bahkan bukan hanya satu atau dua industri tertentu misalnya pertanian atau industri pengolahan, tetapi meliputi semua kegiatan produksi atau unit-unit ekonomi dari berbagai jenis industry yang ada di wilayah tertentu tersebut.

Jadi makna “seluruh unit ekonomi” merupakan semua unit-unit ekonomi di suatu wilayah / Daerah tertentu, dimana unit-unit ekonomi itu dikelompokkan dalam sektor atau sub sektor – sub sektor ekonomi (lapangan usaha). Pengelompokan sektoral ekonomi itu kadang menjadi 3 sektor, 9 sektor atau 17 sektor tergantung konsepsi sektoral ekonomi yang digunakan atau berlaku dimasing-masing Negara/ daerah maupun dalam skala internasional. Sebagai contoh PDRB dengan penyajian 9 (Sembilan) Unit Produksi atau 9 Lapangan Usaha adalah meliputi:

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan;
2. Pertambangan dan Penggalan;
3. Industri Pengolahan;
4. Listrik, Gas dan Air Bersih;

5. Konstruksi;
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran;
7. Pengangkutan dan Komunikasi;
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan;
9. Jasa-jasa termasuk Jasa Pelayanan Pemerintah.

Penyajian 9 (Sembilan) Sektor Lapangan Usaha atau Sektor Produksi/ Ekonomi tersebut kadang masih diperinci lagi masing-masing ke dalam sub sector-sub sector, sehingga secara rinci PDRD itu terdiri:

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; dengan sub sector produksi:
  - a. Tanaman Bahan Makanan;
  - b. Tanaman Perkebunan;
  - c. Peternakan dan Hasil-hasilnya;
  - d. Kehutanan;
  - e. Perikanan.
2. Pertambangan dan Penggalian; dengan sub sector produksi:
  - a. Minyak dan Gas Bumi;
  - b. Pertambangan Tanpa Migas;
  - c. Penggalian.
3. Industri Pengolahan; dengan sub sector produksi :
  - a. Industri Migas;
  - b. Industri Non Migas, yang terdiri dari:
    - 1) Makanan, Minuman dan Tembakau;
    - 2) Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki;
    - 3) Barang Kayu dan Hasil Hutan Lain;
    - 4) Kertas dan Barang Cetak;
    - 5) Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet;
    - 6) Semen dan Barang Lain Bukan Logam;
    - 7) Logam Dasar Besi dan Baja;
    - 8) Alat Angkut, Mesin dan Peralatan;
    - 9) Barang Lainnya.
4. Listrik, Gas dan Air Bersih; dengan sub sector produksi :
  - a. Listrik;
  - b. Air Bersih.
5. Konstruksi;
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran; dengan sub sector produksi :
  - a. Perdagangan Besar dan Eceran;
  - b. Hotel;
  - c. Restoran.
7. Pengangkutan dan Komunikasi; dengan sub sector produksi :
  - a. Pengangkutan, yang terdiri dari :

- 1) Angkutan Rel;
- 2) Angkutan Jalan Raya;
- 3) Angkutan Laut;
- 4) Angkutan Udara;
- 5) Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan;
- 6) Jasa Penunjang Angkutan.
- b. Komunikasi, yang terdiri dari :
  - 1) Pos dan Giro;
  - 2) Telekomunikasi;
  - 3) Jasa Telekomunikasi.
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan; dengan sub sector produksi:
  - a. Bank;
  - b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank;
  - c. Jasa Penunjang Keuangan;
  - d. Sewa Bangunan;
  - e. Jasa Perusahaan.
9. Jasa-jasa, dengan sub sector produksi :
  - a. Pemerintahan Umum;
  - b. Swasta; yang terdiri dari :
    - 1) Sosial Kemasyarakatan;
    - 2) Hiburan dan Rekreasi;
    - 3) Perorangan dan Rumahtangga.

Klasifikasi PDRB di atas merupakan Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) dimana klasifikasi lapangan usaha didasarkan pada Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990). Pengklasifikasian tersebut mengalami perubahan seiring dengan perubahan penggunaan tahun dasar yang baru dimana semula tahun dasar 2000 berubah menjadi tahun dasar 2010. Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan dasar KBLI 2009. Dengan demikian PDRB dengan tahun dasar 2010 yang digunakan untuk penyajian data PDRD tahun 2010 ke depan menggunakan 17 (tujuh belas) lapangan usaha berdasar KBLI 2009 dengan sector ekonomi/ lapangan usaha sebagai berikut:

- A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
- B. Pertambangan dan Penggalian;
- C. Industri Pengolahan;
- D. Pengadaan Listrik dan Gas;
- E. Pengadaan Air;
- F. Konstruksi;
- G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
- H. Transportasi dan Pergudangan;
- I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
- J. Informasi dan Komunikasi;
- K. Jasa Keuangan;
- L. Real Estate;
- M, N. Jasa Perusahaan;
- O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib;
- P. Jasa Pendidikan;
- Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;
- R,S,T,U. Jasa Lainnya.

Data PDRB dapat disajikan dalam tahun tertentu untuk PDRB beberapa atau banyak daerah kabupaten/ kota misalnya kabupaten/kota dalam satu wilayah Provinsi atau wilayah Eks Karesidenan tertentu. Penyajian data PDRB seperti itu berarti penyajian data yang bersifat cross section (waktu tahun tertentu untuk banyak daerah/ wilayah). Penyajian data PDRB antar kabupaten/ kota ini untuk menggambarkan daerah/wilayah mana yang lebih besar/ lebih kecil dibandingkan daerah lainnya (dilihat dari indikator besaran PDRB).

Namun ada juga penyajian data PDRB ini meliputi kurun waktu tertentu pada satu wilayah daerah saja. Penyajian data PDRB ini berarti penyajian data yang bersifat time series (dataurut waktu). Selanjutnya untuk kepentingan analisis data, biasanya untuk mengatasi keterbatasan data, kedua modal penyajian data itu digabungkan sehingga data yang didapatkan memiliki rentang tahun tertentu (time series) dengan jumlah kabupaten/ kota tertentu (cross section). Gabungan data

time series (rentang waktu) dan cross section itu disebut penyajian data yang bersifat panel atau data pooling.

Penyajian PDRB : Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Salah satu factor pengali PDRB selain volume adalah faktor harga barang atau jasa. Maka berdasarkan factor harga barang atau jasa ini terdapat dua model penyajian data PDRB, yaitu: (a) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dimana harga untuk menghitung nilai tambah atau nilai barang dan jasa akhir menggunakan harga yang berlaku di setiap tahun perhitungan PDRB; (b) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dimana harga untuk menghitung nilai tambah atau nilai barang dan jasa akhir menggunakan harga tahun tertentu yang tetap untuk setiap tahun perhitungan PDRB.

Dengan demikian PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) menggambarkan perkembangan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK) menggambarkan pertumbuhan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tahun tertentu sebagai tahun dasar, misalnya tahun yang berakhir dengan angka 3, seperti tahun 1993, 1983 dan seterusnya atau tahun dasar 2000. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sering juga disebut sebagai PDRB Nominal, dimana harga yang digunakan adalah harga yang berlaku pada periode penghitungan. Data PDRB ADHB ini biasanya ditujukan untuk melihat struktur perekonomian daerah. Sedangkan PDRB ADHK sering disebut sebagai PDRB Riil, dimana harga yang digunakan adalah harga pada

tahun dasar tertentu. Data PDRB ADHK ini biasanya ditujukan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Data PDRB merupakan salah satu indikator makro ekonomi daerah yang dapat mengidentifikasi kondisi dan perkembangan perekonomian suatu wilayah setiap tahun. Dengan adanya data PDRB, akan dapat diambil manfaat antara lain:

1. PDRB ADHB atau PDRB Nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB suatu daerah yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi daerah tersebut juga besar, dan sebaliknya nilai DPRB suatu daerah yang lebih kecil menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi daerah tersebut juga cenderung lebih kecil.
2. PDRB ADHK atau PDRB Riil dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sector/lapangan usaha dari tahun ke tahun. Jadi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dihitung berdasarkan data PDRB ADHK atau PDRB Riil, yaitu perubahan dari tahun ke tahun PDRB ADHK tersebut.
3. Distribusi PDRB ADHB menurut lapangan usaha atau lebih tepatnya lagi adalah menurut kelompok lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau kontribusi/ sumbangan setiap lapangan usaha dalam suatu wilayah. Sektor-sektor/ Lapangan Usaha yang mendominasi perekonomian daerah menunjukkan bahwa sector/ lapangan usaha itu merupakan basis perekonomian wilayah yang bersangkutan.



4. PDRB Perkapita ADHB yaitu PDRB ADHB dibagi dengan jumlah penduduk di suatu wilayah menunjukkan nilai PDRB ADHB per satu orang penduduk. PDRB Perkapita ADHK ini dapat dijadikan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
5. PDRB Perkapita ADHK yaitu PDRB ADHK dibagi dengan jumlah penduduk di suatu wilayah menunjukkan nilai PDRB ADHK per satu orang penduduk. Data PDRB Perkapita ADHK ini dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan riil (nyata) ekonomi perkapita suatu wilayah.

Pemilihan tahun untuk menjadi tahun dasar dalam perhitungan PDRB memiliki argumentasi tertentu, terutama adalah masalah stabilitas harga atau stabilitas perekonomian. Tahun yang dipilih menjadi tahun dasar itu bukan tahun yang mengalami gejolak harga atau gejolak perekonomian, namun tahun dimana kondisi perekonomian dalam keadaan stabil, perkembangan harga-harga (inflasi) terkendali, perekonomian menjadi kondusif bagi dunia usaha dan lain sebagainya. Pada kenyataannya, kondisi perekonomian suatu negara tidak terus menerus dalam keadaan stabil apalagi pada kondisi perekonomian dengan pasar lebih terbuka dan globalisasi semakin meluas, perubahan yang terjadi pada tatanan global akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu Negara tidak terkecuali hal itu untuk Indonesia.

Pada masa orde baru sebelum terjadinya krisis ekonomi 1997-1998, tahun dasar yang digunakan disepakati menggunakan tahun yang berakhir dengan 3, misalnya tahun 1973, 1983, dan 1993. Namun setelah terjadi krisis tahun 1997-1998, tahun dasar yang digunakan diubah menjadi tahun 2000 dengan alasan

tahun 2000 perekonomian sudah mulai kembali stabil akibat keberhasilan program-program pemulihan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selama decade terakhir ini, banyak perubahan yang terjadi baik konstelasi perekonomian secara global, nasional, regional maupun local. Krisis finansial secara global yang terjadi pada tahun 2008, implementasi system perdagangan bebas (free trade) antara CHINA – ASEAN (CAFTA), perubahan system pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh-contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistic di seluruh Indonesia.

Salah satu bentuk penyesuaian pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar Produk Domestik Bruto Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar pencatatan PDB tersebut seiring dengan adanya rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA2008) melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT). Perubahan tahun dasar atas data PDB ini dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan PDRB provinsi maupun kabupaten/ kota dalam rangka menjaga konsistensi hasil penghitungan. SNA2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur item tertentu dalam PDRB. SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi dan

akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan difaham

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain akan bermanfaat untuk :

1. Memberikan informasi tentang kondisi dan perkembangan perekonomian regional/ daerah yang paling baru (terkini), menyangkut pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur perekonomian daerah;
2. Meningkatkan kualitas data PDRB, karena dengan tahun dasar PDRB yang baru, kualitas data PDRB lebih sesuai dengan kondisi perekonomian yang berkembang saat ini;
3. Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional, karena dengan menggunakan standar pencatatan yang diakui secara internasional maka data PDRB dapat diperbandingkan dengan data-data PDRB di Negara-negara lain.

Perubahan harga tahun dasar seperti dari harga tahun dasar 2000 menjadi harga tahun dasar 2010 akan memberikan beberapa pengaruh antara lain :

1. Meningkatkan nominal PDRB yang pada gilirannya akan berpengaruh pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan kemungkinan terjadinya pergeseran struktur perekonomian;
2. Dampak ikutan dari perubahan nominal PDRB tentu akan merubah juga besaran indikator makro ekonomi regional misalnya rasio upaya

pajak (tax effort), rasio hutang terhadap PDRB, rasio investasi dan tabungan terhadap PDRB, struktur dan pertumbuhan ekonomi daerah;

3. Demikian pula dengan adanya perubahan nominal PDRB dan indikator makro ekonomi regional ikutan lainnya akan menyebabkan perubahan pada input data untuk modelling dan forecasting serta analisis- analisis statistic lainnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini telah melakukan beberapa kali perubahan tahun dasar secara berkala atau kurang lebih sudah 5 kali yaitu tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Perubahan terakhir dari tahun dasar 2000 menjadi 2010 ini memiliki beberapa alasan sebagai berikut:

1. Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 cenderung relative stabil;
2. Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 tahun terakhir terutama di bidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
3. Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 tahun atau 10 tahun;
4. Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA2008;
5. Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dan Indeks Harga Produsen (Producers Price Index = PPI);

6. Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut

### **Teori Basis Ekonomi**

Dalam perekonomian regional terdapat kegiatan-kegiatan basis dan kegiatan-kegiatan bukan basis. Menurut Glasson (1990) kegiatan kegiatan basis (Basis activities) adalah kegiatan mengekspor barang-barang dan jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya atau memasarkan barang dan jasa mereka kepada orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan bukan basis (non basis activities ) adalah kegiatan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal didalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. (Mangun, 2007). Analisis sektor basis ini umumnya didasarkan pada nilai tambah (pendapatan) atau pun lapangan kerja.

Menurut Arsyad (1999 :116) teori basis ekonomi menyatakan bahwa factor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Teori basis ekonomi pada intinya membedakan aktivitas sektor basis dan aktivitas sektor non basis. Aktivitas sektor basis adalah pertumbuhan sektor tersebut menentukan pembangunan menyeluruh daerah itu, sedangkan aktivitas sektor non basis merupakan sektor skunder (city polowing) artinya tergantung perkembangan yang terjadi dari pembangunan yang menyeluruh.

Terdapat beberapa cara dalam memilah antara kegiatan basis dan non basis, yaitu antara lain dengan metode langsung, metode tidak langsung, metode campuran dan metode Location Quotion (Tarigan, 2004). Menurut tarigan (2004), metode langsung dapat dilakukan dengan survey langsung kepelaku usaha darimana mereka memperoleh barang-barang kebutuhan untuk memproduksi barang dan kemana mereka memasarkan barang-barang tersebut. Metode tidak langsung adalah dengan menggunakan asumsi. Kegiatan yang mayoritas produknya dijual keluar wilayah langsung dianggap sector basis, sedangkan yang mayoritas produknya dipasarkan local langsung dianggap non basis. Adapun metode campuran adalah dengan menggunakan data sekunder sebagai survey pendahuluan. Baru kemudian dilakukan survey langsung terhadap sektor-sektor yang dianggap perlu. Sedangkan metode LQ adalah dengan membandingkan porsi lapangan kerja/nilai tambah suatu wilayah dibandingkan dengan porsi lapangan kerja/nilai tambah untuk sector yang sama secara nasional. Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan kedalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan barang dan jasa sehingga akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan. Sebaliknya berkurangnya kegiatan basis akan mengurangi pendapatan suatu daerah dan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa dan akan menurunkan volume kegiatan (Richardson, 1977)

Teori basis ekonomi berupaya untuk menemukan dan mengenali aktivitas basis dari suatu wilayah, kemudian meramalkan aktivitas itu dan menganalisis dampak tambahan dari aktivitas ekspor tersebut. Konsep kunci dari teori basis ekonomi adalah bahwa kegiatan ekspor merupakan mesin pertumbuhan. Tumbuh

tidaknya suatu wilayah ditentukan oleh bagaimana kinerja wilayah itu terhadap permintaan akan barang dan jasa dari luar.

Lebih lanjut dalam analisis teori basis ekonomi, teori tersebut dapat digunakan untuk menentukan sektor dan subsektor potensial di Provinsi Jambi berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Apabila sektor potensial tersebut dapat dikembangkan dengan baik tentunya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah secara optimal. Menurut teori ini suatu daerah dapat dibedakan menjadi daerah andalan dan bukan andalan, yang selanjutnya dimodifikasi menjadi sektor/subsektor ekonomi potensial dan bukan sektor/subsektor ekonomi potensial

### **Location Quotient (LQ)**

Analisis location quotient (LQ) merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang memanfaatkan sektor basis atau leading sektor. Location quotient menghitung perbandingan share output sektor i di kota atau kabupaten dan share out sektor i di provinsi. Sektor unggulan disini berarti sektor bisnis yang tidak akan habis apabila dieksploitasi oleh pemerintah wilayah. Menurut Hood (1998 dalam Hendayana 2003), menyatakan bahwa location quotient adalah suatu alat pengembangan ekonomi yang lebih sederhana dengan segala kelebihan dan keterbatasannya.

Teknik LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemicu pertumbuhan. LQ mengukur konsentrasi relatif atau derajat spesialisasi kegiatan ekonomi melalui pendekatan perbandingan. Teknik LQ banyak digunakan untuk membahas kondisi perekonomian, mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian atau mengukur konsentrasi relative kegiatan ekonomi untuk mendapatkan gambaran dalam penetapan sector unggulan sebagai leading sector suatu kegiatan ekonomi industri. Dasar pembahasannya sering difokuskan pada aspek tenaga kerja dan pendapatan.

Teknik LQ belum bisa memberikan kesimpulan akhir dari sektor-sektor yang teridentifikasi sebagai sektor strategis. Namun untuk tahap pertama sudah cukup memberi gambaran akan kemampuan suatu wilayah dalam sektor yang teridentifikasi. Rumus matematika yang digunakan untuk membandingkan kemampuan sektor-sektor dari wilayah tersebut adalah (Daryanto dan Hafizrianda, 2010:21):

#### 1. Pendekatan Tenaga Kerja

$$LQ = \frac{Li/Lt}{Ni/Nt}$$

#### 2. Pendekatan Nilai Tambah / Pendapatan

$$LQ = \frac{Vi/Vt}{Yi/Yt}$$

Dimana :

Li = jumlah tenaga kerja sektor i pada tingkat wilayah yang lebih rendah  
Lt = total tenaga kerja pada tingkat wilayah yang lebih rendah  
Ni = jumlah tenaga kerjan sektor i pada tingkat wilayah yang lebih diatas



$N_t$  = total tenaga kerja pada tingkat wilayah yang lebih diatas

$V_i$  = nilai PDRB sektor  $i$  pada tingkat wilayah yang lebih rendah

$V_t$  = total PDRB pada tingkat wilayah yang lebih rendah

Hasil perhitungan LQ dapat digunakan untuk mengidentifikasi mana

yang termasuk sektor unggulan dan mana yang bukan unggulan, yaitu :

1. Bila  $LQ > 1$  menunjukkan bahwa sektor tersebut tergolong sektor ekonomi unggulan. Artinya sektor tersebut prospektif (menguntungkan) untuk dikembangkan lebih lanjut dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah dan memenuhi permintaan baik pasar lokal, regional atau nasional.
2. Bila  $LQ < 1$  memberikan indikasi sektor tersebut bukan termasuk sektor unggulan, yang berarti sektor tersebut kurang prospektif untuk dikembangkan dan ada kecendrungan justru memerlukan pemenuhan permintaan dari daerah lain.
3. Bila  $LQ = 1$  memberikan indikasi sektor tersebut sama setingkat dengan sektor yang sama pada wilayah setingkat lebih luas.

Setiap metode analisis memiliki kelebihan dan keterbatasan, demikian halnya dengan metode LQ. Kelebihan metode LQ dalam mengidentifikasi komoditas unggulan antara lain:

1. LQ merupakan suatu alat analisis yang digunakan dengan mudah dan sederhana, serta cepat penggunaannya.
2. LQ dapat digunakan sebagai analisis awal untuk suatu wilayah, kemudian dapat dilanjutkan dengan alat analisis lainnya.
3. Perubahan tingkat spesialisasi dari setiap sektor dapat pula diketahui dengan membandingkan LQ dari tahun ke tahun.

4. Penerapannya tidak memerlukan program pengolahan data yang rumit. Penyelesaian analisis cukup dengan spread sheet dari Excel atau program Lotus jika datanya tidak terlalu banyak.

Dari segi keterbatasannya, metode LQ terbatas dalam:

1. Karena kesederhanaan pendekatan LQ ini, maka yang dituntut adalah akurasi data. Sebaik apapun hasil olahan LQ tidak akan banyak manfaatnya jika data yang digunakan tidak valid.
2. Pengumpulan data yang sangat valid sangat sulit dilakukan di lapangan sehingga mempersulit pengumpulan data.
3. Deliniasi wilayah kajian. Untuk menetapkan batasan wilayah yang dikaji dan ruang lingkup aktivitas, acuannya sering tidak jelas. Akibatnya hasil hitungan LQ terkadang aneh, tidak sama dengan apa yang kita duga.
4. Perlu diketahui bahwa nilai LQ dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nilai hasil perhitungannya bias, karena tingkat disagregasi peubah spesialisasi, pemilihan peubah acuan, pemilihan entity yang diperbandingkan, pemilihan tahun dan kualitas data

Komoditas yang menghasilkan nilai  $LQ > 1$  merupakan standar normative untuk ditetapkan sebagai komoditas unggulan. Namun demikian ketika banyak komoditas di suatu wilayah yang menghasilkan  $LQ > 1$ , sementara yang dicari hanya satu, maka yang harus dipilih adalah komoditas yang mendapatkan LQ paling tinggi. Karena nilai LQ yang semakin tinggi di suatu wilayah menunjukkan semakin tinggi pula potensi keunggulan komoditas tersebut. Dengan demikian, metode analisis LQ atau location quotient dapat digunakan secara mudah dan

efisien jika ingin menghitung sektor unggulan suatu tempat. Kekurangan kekurangan yang ditemui di lapangan dapat dikurangi dengan teliti dan rajin dalam mengumpulkan data. Hasil yang didapatkan kemudian adalah akurasi dan sektor unggulan yang dapat diberdayakan dan dikembangkan oleh seluruh masyarakat wilayah tertentu.

Berdasarkan data PDRB, kontribusi sektoral maupun laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, dapat dilakukan perhitungan menggunakan metode Location Quotient (LQ) untuk mencari keunggulan komparatif yang dimiliki Provinsi Jambi terhadap Indonesia dengan cara mengidentifikasi sektor basis dan non basis. Data yang dipergunakan adalah data atas dasar harga konstan dengan tujuan untuk melihat perkembangan perekonomian secara riil yang pertumbuhannya tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan harga atau inflasi/deflasi. Sektor-sektor yang termasuk dalam sector basis menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif. Dengan bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu wilayah maka arus pendapatan yang masuk ke wilayah tersebut (monetary inflow) akan bertambah karena adanya kegiatan ekspor. Sebaliknya, kegiatan non basis menyebabkan keluarnya pendapatan dari wilayah tersebut ke wilayah lain (monetary outflow) yang disebabkan wilayah bersangkutan mengimpor kekurangan akan permintaan di sektor tersebut untuk memenuhi kebutuhan di dalam wilayah.

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

#### **Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sedangkan analisis kuantitatif adalah metode analisis yang melakukan perhitungan terhadap data-data yang bersifat pembuktian dari masalah. Sehingga metode deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang memamparkan atau menjelaskan data melalui angka-angka.

#### **Alat Analisis**

Adapun metode penelitian yang dipakai untuk menganalisis permasalahan adalah dengan menggunakan teknik analisis LQ (Location Quotient) yaitu salah satu teknik analisis dalam perencanaan pembangunan yang di gunakan untuk menganalisis sektor potensial atau sektor basis dalam perekonomian suatu daerah dengan membandingkan peranan sektor tersebut dalam perekonomian suatu daerah di Provinsi Jambi dengan sektor lain dalam perekonomian nasional.

Dengan rumus menurut Bendavid – Val sebagai berikut :

$$LQ = \frac{E_{IJ}/E_j}{E_{in}/E_n} \dots\dots\dots (1)$$

Dimana :

- LQ = Koefisien Location Quotion
- E<sub>ij</sub> = PDRB sektor I diwilayah studi
- E<sub>j</sub> = Total PDRB di wilayah studi
- E<sub>in</sub> = PDRB sektor i diwilayah referensi
- E<sub>n</sub> = Total PDRB diwilayah referensi

Selanjutnya untuk mencari pengaruh sektor basis dan non basis terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi maka menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Data diolah dengan menggunakan bantuan software SPSS seri 21.0. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi variabel independent terhadap variabel dependent. Dimana dalam penelitian ini, sektor basis ( $X_1$ ) dan sector non basis ( $X_2$ ) sebagai variabel independent (variabel bebas), akan dianalisis pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y$ ) sebagai variabel dependent (variabel terikat), berdasarkan model dasar dapat diformulasikan menjadi persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

- Y = Pertumbuhan Ekonomi
- A = konstanta
- B = koefisien regresi
- $X_1$  = Laju Pertumbuhan sector basis
- $X_2$  = Laju Pertumbuhan sector non basis

Dimana untuk penelitian ini, rumus regresi menggunakan log sehingga rumus regresi menjadi sebagai berikut :

$$\text{Log } Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

- Y = Pertumbuhan ekonomi (persen)
- $X_1$  = Laju Pertumbuhan Sektor Basis (persen)
- $X_2$  = Laju Pertumbuhan Sektor Non Basis (persen)
- Log = Logaritma
- $\beta_0$  = Konstanta
- $\beta_1$  = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel bebas
- e = Standar error

## **BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Sektor Basis dan Non Basis di Provinsi Jambi**

Untuk mengidentifikasi suatu sektor/subsektor ekonomi potensial dan bukan potensial digunakan alat analisis Location Quotient (LQ). Arsyad (1999:315) menjelaskan bahwa teknik Location Quotient dapat membagi kegiatan ekonomi suatu daerah menjadi dua golongan yaitu:

1. Kegiatan sektor ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan. Sektor ekonomi seperti ini dinamakan sector ekonomi potensial (basis)
2. Kegiatan sektor ekonomi yang melayani pasar di daerah tersebut dinamakan sektor tidak potensial (non basis) atau local industry.

Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (job creation) (Arsyad, 1999)

Untuk mengetahui sector basis dan non basis yang ada di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 LQ PDRB Provinsi Jambi Terhadap PDB Indonesia  
Tahun 2010 – 2021

Sektor PDRB	Tahun												Total	Rata-rata	Jenis Sektor
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,82	1,82	1,84	1,84	1,92	1,85	1,79	1,73	1,67	1,62	2,01	2,04	21,95	1,83	Sektor Basis
B. Pertambangan dan Penggalian	2,49	2,66	2,68	2,69	2,71	2,80	2,79	2,88	2,99	3,12	3,08	0,56	33,91	2,83	Sektor Basis
C. Industri Pengolahan	0,51	0,51	0,51	0,52	0,51	0,50	0,49	0,49	0,48	0,48	0,49	0,03	5,97	0,50	Sektor Non Basis
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,07	0,55	0,05	Sektor Non Basis
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,21	0,17	0,01	Sektor Non Basis
F. Konstruksi	0,43	0,41	0,44	0,50	0,72	0,70	0,69	0,69	0,69	0,70	0,56	43,80	6,02	0,50	Sektor Non Basis
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,31	2,29	2,30	2,26	0,63	0,68	0,70	0,70	0,71	0,72	2,51	0,28	27,92	2,33	Sektor Basis
H. Transportasi dan Pergudangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78	0,79	0,77	0,76	0,74	0,00	0,00	0,04	0,00	Sektor Non Basis
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,24	0,23	0,22	0,21	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,17	0,01	2,52	0,21	Sektor Non Basis
J. Informasi dan Komunikasi	0,91	0,90	0,87	0,84	0,70	0,70	0,70	0,68	0,69	0,67	0,93	1,27	10,60	0,88	Sektor Non Basis
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,67	0,74	0,75	0,77	0,60	0,56	0,57	0,56	0,54	0,52	0,75	11,86	8,94	0,75	Sektor Non Basis
L. Real Estate	1,07	1,03	1,00	0,96	0,47	0,47	0,47	0,47	0,48	0,49	0,78	0,11	10,52	0,88	Sektor Non Basis
M.N. Jasa Perusahaan	0,31	0,29	0,29	0,29	0,62	0,61	0,60	0,58	0,56	0,53	0,28	0,03	3,55	0,30	Sektor Non Basis

O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,18	1,14	1,08	1,03	0,97	0,99	0,99	1,00	0,98	0,99	1,0	0,4	12,90	1,07	Sektor Basis
P. Jasa Pendidikan	3,58	3,33	3,24	3,12	0,99	0,99	1,01	1,02	1,02	1,02	2,5	1,1	35,11	2,93	Sektor Basis
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,66	0,63	0,64	0,64	0,97	1,00	1,01	1,00	0,99	0,98	0,7	0,2	7,86	0,66	Sektor Non Basis
R.S.T.U. Jasa lainnya	0,72	0,68	0,66	0,64	0,60	0,61	0,60	0,58	0,56	0,53	0,5	0,2	7,22	0,60	Sektor Non Basis

Sumber : Data diolah



Dari ketentuan di atas, maka sector basis dan non basis provinsi Jambi sejak tahun 2010 – 2021 adalah terlihat pada tabel 4.2 sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Sektor Basis dan Non Basis Provinsi Jambi**  
**Tahun 2010-2021**

No	Sektor	Nilai rata- rata LQ	Kategori Sektor
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,83	Sektor Basis
2	Pertambangan dan Penggalian	2,83	Sektor Basis
3	Industri Pengolahan	0,50	Sektor Non Basis
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	Sektor Non Basis
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	Sektor Non Basis
6	Konstruksi	0,50	Sektor Non Basis
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,33	Sektor Basis
8	Transportasi dan Pergudangan	0,00	Sektor Non Basis
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,21	Sektor Non Basis
10	Informasi dan Komunikasi	0,88	Sektor Non Basis
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,75	Sektor Non Basis
12	Real Estate	0,88	Sektor Non Basis
13	Jasa Perusahaan	0,30	Sektor Non Basis
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,07	Sektor Basis
15	Jasa Pendidikan	2,93	Sektor Basis
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,66	Sektor Non Basis
17	Jasa lainnya	0,60	Sektor Non Basis

Sumber : Data diolah

Dari tabel 4.1 dan 4.2 terlihat bahwa diantara kelima sektor basis tersebut, sektor jasa pendidikan memiliki koefisien LQ tertinggi, diikuti oleh sector pertambangan dan penggalian, sector Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sector pertanian, kehutanan dan perikanan, dan sector Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dan sector pendidikan. Kelima sektor ekonomi basis tersebut merupakan sector yang memiliki potensi dan kemampuan yang lebih besar untuk mendorong

peningkatan dan percepatan proses pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Dengan kata lain kelima sektor basis tersebut perlu mendapat prioritas utama bagi pemerintah Provinsi Jambi dalam proses pembangunan ekonomi pada masa yang akan datang, terutama pada sektor jasa pendidikan.

Sementara untuk sector non basis yang memiliki nilai LQ yang tertinggi hingga terendah adalah sector informasi dan komunikasi, sector real estate, sector jasa keuangan dan asuransi, sector jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sector jasa lainnya, sector industry pengolahan, sector konstruksi, sector jasa perusahaan, sector penyedia akomodasi dan makan minum, sector pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan sector transportasi dan pergudangan

### **Pengaruh Sektor Basis dan Non Basis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

#### **Analisis Hasil Regresi Berganda**

Untuk mengukur pengaruh sector basis dan non basis terhadap pertumbuhan ekonomi maka angka yang digunakan adalah laju pertumbuhan PDRB sector basis dan sector non basis. Dari data diatas, dilakukan analisis regresi berganda untuk melihat pengaruh sector pertambangan dan penggalian, sector pertanian, kehutanan dan perikanan dan sector pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jambi dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 5.3.

Berdasarkan olahan regresi tabel 4.3, dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$PE = -0,485 + 0,692SB + 0,316SNB + e$$

Persamaan regresi di atas diperoleh angka constant sebesar -0,485 artinya, apabila apabila sector basis dan sector non basis bernilai 0 atau tidak mengalami

perubahan atau dengan asumsi konstan, maka pertumbuhan ekonomi (PE) untuk Provinsi Jambi sebesar -0,485%. Koefisien regresi untuk variabel sector basis adalah 0,692 koefisiennya bernilai positif. Ini artinya apabila variabel sector basis naik sebesar 1% maka dapat diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan sebesar 0,692% dan sebaliknya. Koefisien regresi variabel sector non basis adalah 0,316 koefisiennya bernilai positif, ini artinya apabila variabel sector non basis naik sebesar 1% maka diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan sebesar 0,316% dan demikian pula sebaliknya.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Pengolahan Regresi Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,485	,679		-,714	,495
SEKTORBASIS	,692	,294	,671	2,358	,046
SEKTORNONBASIS	,316	,301	,298	1,048	,325

a. Dependent Variable: PERTUMBUHANEKONOMI

## Hasil Uji Hipotesis

### Uji Parsial (Uji t)

Untuk melihat secara parsial pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan Uji t dengan hasil sebagaimana tertera ada tabel 5.4. Berdasarkan hasil regresi uji t diperoleh nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel sector basis adalah sebesar 2,358 dengan tingkat keyakinan 5% ( $\alpha=0,05$ ) diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 2,306, sehingga dapat diketahui bahwa  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $2,358 > 2,306$ ), maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ , artinya terdapat

pengaruh signifikan antara sector basis terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Sementara untuk sektot non basis diperoleh nilai<sub>hitung</sub> untuk sebesar 1,048 dengan tingkat keyakinan 5% ( $\alpha=0,05$ ) diperoleh  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 2,306, sehingga dapat diketahui bahwa  $t_{\text{hitung}}$  lebih kecil dari  $t_{\text{tabel}}$  ( $1,048 > 2,306$ ), maka  $H_0$  diterima dan menolak  $H_a$ . artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara sector non basis terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

**Tabel 4.4**  
**Hasil Regresi Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	t	Sig.
1 (Constant)	-,714	,495
SEKTORBASIS	2,358	,046
SEKTORNONBASIS	1,048	,325

a. Dependent Variable: PERTUMBUHANEKONOMI

### Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk pengujian terhadap variabel-variabel independen secara bersama-sama yang dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.5**  
**Nilai F hitung**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	50,630	2	25,315	39,869	,000 <sup>b</sup>
	Residual	5,080	8	,635		
	Total	55,710	10			

a. Dependent Variable: PERTUMBUHANEKONOMI

b. Predictors: (Constant), SEKTORNONBASIS, SEKTORBASIS

Untuk mengetahui signifikan atau tidak berpengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan probability sebesar 5% atau  $< 0,05$  dengan uji satu arah dimana  $df1 = 2$  (2 variabel bebas) dan  $df2 = 11-2-1=8$  didapat :  $F_{tabel} = 5,050$ , maka  $F_{hitung} 39,869 > F_{tabel} = 4,46$  artinya dalam penelitian ini menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ , artinya bahwa secara bersama-sama variabel sector basis dan sector non basis berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi.

### Uji Koefisien Determinasi $R^2$

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat apakah terdapat hubungan yang kuat antara variabel bebas, yaitu sector basis dan sector non basis dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Untuk itu perlu dilihat nilai koefisien klerasinya ( $R$ ).

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi  $R^2$**

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,953 <sup>a</sup>	,909	,886	,79685	,909	39,869	2	8	,000

a. Predictors: (Constant), SEKTORNONBASIS, SEKTORBASIS

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai adjusted R Square adalah 0,886 atau 88,6% yang diartikan bahwa sebesar 88,6% pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh variabel sector basis dan sector non basis dan sisanya sebesar 11,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Rata-rata dari tahun 2010-2021, dari 17 sektor yang terdapat pada PDRB, sector basis yang dimiliki provinsi Jambi hanya ada sector yaitu sector pertambangan dan penggalian, sector Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sector pertanian, kehutanan dan perikanan, dan sector Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dan sector pendidikan. Semengntara 12 sektor lainnya masih merupakan sector non basis yaitu sector informasi dan komunikasi, sector real estate, sector jasa keuangan dan asuransi, sector jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sector jasa lainnya, sector industry pengolahan, sector kontruksi, sector jasa perusahaan, sector penyedia akomodasi dan makan minum, sector pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan sector transportasi dan pergudangan
2. Berdasarkan hasil regresi uji t, variabel sector basis secara parsial,  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $2,358 > 2,306$ ), maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ . artinya terdapat pengaruh signifikan antara sector basis terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Sementara untuk sektor non basis secara parsial diperoleh  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $1,048 > 2,306$ ), maka  $H_0$  diterima dan menolak  $H_a$ . artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara sector non basis terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.
3. Untuk pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikat diperoleh nilai  $F_{hitung} 39,869 > F_{tabel} = 4,46$  artinya dalam penelitian ini

menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ , artinya bahwa secara bersama-sama variabel sector basis dan sector non basis berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi.

### **Saran**

1. Pemerintah Provinsi Jambi harus berupaya lebih keras lagi untuk menambah sector-sektor basis yang ada di Provinsi Jambi. Karena berdasarkan penelitian ini sejak tahun 2010-2021, rata-rata sector basis yang ada di Provinsi Jambi baru berjumlah 5 sektor sementara 12 sektor lainnya masih termasuk sector non basis
2. Bagi Akademisi, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk bahan mengajar ataupun melakukan penelitian selanjutnya yang juga bisa dijadikan sebagai bahan dalam menambah wawasan
3. Bagi peneliti selanjutnya agar bisa meneliti lebih dalam dan luas serta memahami tentang permasalahan sector basis dan sector nonbasis terhadap pertumbuhan ekonomi dan menambah referensi lain yang lebih banyak lagi

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 2011. Pengantar Perencanaan dan pembangunan Ekonomi daerah Edisi kedua, Yogyakarta.BPFE
- Boediono. 1985. Teori Pertumbuhan Ekonomi., Yogyakarta, BPFE-UGM
- Firdausi. 2012. Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Aceh Barat. Banda Aceh. Tesis S2PPS.Unsyiah
- Hilmi, Didi Fuad, Abubakar Hamzah<sup>2</sup> , Sofyan Syahnur<sup>3</sup>. 2014. Analisis Sektor Basis Kabupaten Kota Dan Pusat Pengembangan Ekonomi Provinsi Jawa Barat. Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, ISSN 2302-0172 Pages pp. 50- 61 Volume 2, No. 2, Mei 2014.
- Mangun, N. 2007. Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah . Semarang. Tesis S2. Pps. Undip
- Prasetyo. S. 2001. Teori Pertumbuhan Berbasis Ekonomi (eksport) Posisi Dan Sumbangannya bagi Perbendaharaan Alatalat Analisis Regional. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol.16 No.1.
- Rustiadi, Ernani, Dkk.(2011). “Perencanaan dan Pengembangan Wilayah”. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Rakyat. Sadono Sukirno. (1985). Ekonomi Pembangunan. Jakarta : LPEF-UI Bima Grafika
- Rusli, Aditia Nugraha, Angelalia Roza<sup>2,\*</sup>, Andi Mulya Rusli<sup>3</sup>. 2021. Analisis Sektor Basis dan Sektor Non-Basis dalam Upaya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan di Kota Padang Analysis of Basic and Non-Basic Sectors as Efforts to Improve the Urban Facilities and Infrastructure in Padang. Volume 21 Nomor 01, April 2021 : 45-52 45
- Sambodo, (2002). “Analisis Sektor Unggulan Provinsi Kalimantan Barat,” Volume 10 Nomor 2.
- Shafariani.F. 2011. Analisis Kawasan Andalan Sebagai Pusat Pertumbuhan di Provinsi Aceh. PPs.Unsyiah. Aceh
- Tarigan, R. 2004. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi, Jakarta: Bumi Aksara
- Tutupoho, Ali. 2019. Analisis Sektor Basis Dan Sektor Non Basis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku (Studi Kasus Kabupaten Kota). Vol. XIII, No. 1, Mei 2019 Cita Ekonomika, Jurnal Ekonomi ISSN 1978-3612



## Lampiran

## Biaya Dan Jadwal Penelitian

### Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan (Rp)
1	Transportasi	250.000,-
2	Pembelian bahan habis pakai	400.000,-
3	Konsumsi	250.000,-
4	Penerbitan Jurnal	600.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.500.000,-</b>

## Jadwal Penelitian

[illegible]